

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KULIT DAN
KELAMIN SERTA ESTETIKA DALAM LAYANAN
TELEDERMATOLOGI DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA KLINIK UTAMA KINIBALU
BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2
Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Erika Dewi Essary
NIM 21.C2.0080

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIKA SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Teledermatologi merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan layanan kepada tenaga kesehatan atau pasien kulit dan kelamin serta estetika, dan telah banyak dilakukan di Indonesia. Teledermatologi berkaitan dengan citra ujud kelainan kulit (UKK) dan organ intim. Namun, Indonesia belum memiliki peraturan spesifik yang mengatur tentang teledermatologi dan perlindungan hukum pada pasiennya. Klinik Utama Kinibalu terletak di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang memiliki 10 bidang pelayanan dokter spesialis, salah satunya adalah kulit dan kelamin serta estetika. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat tiga keluhan pasien dari 400 teledermatologi di Klinik Utama Kinibalu dalam satu tahun. Risiko kesalahan diagnosis dan terapi lebih besar pada layanan teledermatologi dibandingkan layanan kesehatan secara langsung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum pasien dalam layanan teledermatologi di Indonesia dan di Klinik Utama Kinibalu, serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum pasien tersebut di Klinik Utama Kinibalu. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai perlindungan hukum pasien kulit dan kelamin serta estetika dalam layanan teledermatologi di Indonesia. Namun secara tersirat, pengaturan teledermatologi terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan, terutama pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Klinik Utama Kinibalu telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna layanan teledermatologi. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum pasien teledermatologi di Klinik Utama Kinibalu, yaitu: faktor yuridis (belum adanya pedoman dan standar prosedur operasional), teknis (keterbatasan aksesibilitas, media foto UKK, dan waktu tunggu yang lama), serta sosial (budaya, komunikasi masyarakat terutama terkait penyakit kelamin). Saran yang diberikan adalah perlunya sosialisasi hak dan kewajiban pasien pengguna layanan teledermatologi, peningkatan koneksi internet, panduan khusus cara pengambilan foto UKK pada pasien, dan penambahan jumlah dokter penyedia layanan.

Kata Kunci: Kulit Kelamin dan Estetika, Pasien, Perlindungan Hukum, Teledermatologi

ABSTRACT

Teledermatology is the use of technology to provide services to health workers or skin and genital and aesthetic patients, and has been widely practiced in Indonesia. Teledermatology is related to the appearance of skin disorders (UKK) and intimate organs. However, Indonesia has no specific regulations governing teledermatology and legal protection for its patients. Kinibalu Main Clinic is located in Banjarmasin, South Kalimantan and has 10 specialist doctor services, one of which is dermatovenereology and aesthetics. Based on pre-research, there were three patient complaints from 400 teledermatologists at the Kinibalu Main Clinic in one year. The risk of diagnostic and therapeutic errors is greater in teledermatology services compared to in-person health services.

The aim of this research is to determine and analyze the legal protection arrangements for patients in teledermatology services in Indonesia and at the Kinibalu Main Clinic, as well as the inhibiting factors in the implementation of legal protection for patients at the Kinibalu Main Clinic. The approach method used is the sociological juridical method. The research specifications used are analytical descriptive. The types of data used in this research are primary and secondary data. Data analysis uses qualitative analysis.

The research results show that there are no specific regulations regarding legal protection for dermatovenereology and aesthetics in teledermatology services in Indonesia. However, implicitly, teledermatology regulations are contained in several laws and regulations, especially in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Kinibalu Utama Clinic has attempted to provide legal protection for patients using teledermatology services. Inhibiting factors in implementing legal protection for teledermatology at the Kinibalu Main Clinic, namely: juridical factors (lack of guidelines and standard operational procedures), technical (limited accessibility, UKK photo media, and long waiting times), and social (culture, community communication, especially regarding venereal diseases). The suggestions given are the need to socialize the rights and obligations of patients using teledermatology services, improve internet connections, special guidance on how to take UKK photos, and increase the number of doctors providing services.

Keywords: dermatovenereologist patients, legal protection, teledermatology